

Merefleksikan Kembali Toleransi Bagi Kebersamaan Yang Pluralistik Antar Manusia

Yustinus J.W. Yuniarto*, Ambrosius Heri Krismawanto, Nerita Setiyaningtiyas
Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang, Indonesia
*yustinusjwy@gmail.com

Abstract

Tolerance is an important concept when society experiences disputes or conflicts of interest. Misuse of the word tolerance occurs when the word only means there is no conflict on the surface layer of people's lives. In fact, the potential for conflict is like burning husks. Sowing the seeds of tolerance is not just aimed at eliminating differences or eliminating conflicts. Tolerance is the essence of the existence of society itself. This article will analyze the concept of tolerance and how to raise awareness that tolerance stems from a person's self-concept in looking at those around him. The following article reviews the ideas behind the term tolerance. Tolerance has breadth and depth of meaning. This study employed qualitative method with literature research design. Data were analyzed with content analysis method. The study results show that tolerance grows as part of the human personality. When humans are able to embrace tolerance, there is a guarantee that the preservation of all differences and all kinds of conflicts can continue constructively. Both must exist for the sake of humanity. It is hoped that the meaning of the value of tolerance will not be manipulated by people who have evil intentions to justify their evil behavior and actions. Nor should the idea of tolerance be used by humble and simple people to hand over their rights to arrogant and greedy people. Tolerance should not benefit the evil one and harm those who live simply.

Keywords: *Public Welfare; Hospitality; Primacy of Justice; Social Reason; Modus Vivendi*

Abstrak

Toleransi adalah konsep penting ketika masyarakat mengalami perselisihan atau benturan kepentingan. Penyalahgunaan kata toleransi terjadi ketika kata itu hanya berarti tidak ada konflik di lapisan permukaan kehidupan masyarakat. Padahal sebenarnya potensi konflik seperti sekam yang membara. Penyemaian benih toleransi bukan sekedar bertujuan untuk meniadakan perbedaan atau menghilangkan konflik. Toleransi adalah hakekat keberadaan masyarakat itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk menelaah kesadaran bahwa toleransi bersumber dari konsep kedirian seseorang dalam memandang mereka yang ada di sekitarnya. Artikel berikut ini membahasakan kembali gagasan-gagasan yang ada di balik istilah toleransi. Toleransi memiliki keluasan dan kedalaman makna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain *literature research*. Data diolah dengan menggunakan *content analysis method*. Hasil studi menunjukkan bahwa toleransi tumbuh sebagai bagian dari kepribadian manusia. Pada saat manusia mampu memeluk toleransi maka ada jaminan terhadap kelestarian segala perbedaan dan segala macam konflik dapat terus berlangsung secara konstruktif. Keduanya harus ada demi kemanusiaan. Kebermaknaan nilai toleransi tidak membenarkan perilaku dan tindakan jahat mereka yang dengan sengaja hendak memanipulasi konsep tersebut. Konsep toleransi juga menguatkan orang-orang yang

rendah hati dan sederhana untuk memperjuangkan hak mereka di hadapan orang-orang yang angkuh dan serakah.

Kata Kunci: Kesejahteraan Publik; Hospitalitas; Keutamaan Keadilan; Nalar Sosial; Modus Vivendi

Pendahuluan

Tema mengenai toleransi adalah tema utama dalam masyarakat pluralistik (Fitriani, 2020; Yunus, 2022). Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama dalam bidang agama. Permasalahan yang mendasari kajian ini adalah masih banyaknya konflik dan tindak kekerasan, karena perbedaan identitas agama. Penghancuran tempat ibadah keagamaan merupakan bukti nyata. Fenomena tersebut bersumber dari indikasi bahwa ada komponen dari kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik (Setyawan, 2019). Padahal agama bisa menjadi energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera.

Masyarakat pluralistik adalah modal sosial bangsa Indonesia (Murtado, 2021). Gagasan tentang toleransi tidak akan muncul dalam kelompok yang seragam atau homogen. Toleransi dan perbedaan atau heterogen adalah pasangan yang tidak dapat diceraikan. Toleransi hanya dapat muncul pada saat orang-orang yang punya perbedaan saling bertemu dan terlibat dalam konflik untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi bersama.

Toleransi punya peran penting dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar yang sama seringkali terungkap dalam kata-kata, rumusan-rumusan, ajaran-ajaran, dan istilah-istilah yang tidak hanya mirip, tetapi sangat mungkin berbeda sama sekali. Keduanya juga dapat mewujudkan dalam pilihan tindakan-tindakan moral yang terkadang mirip tetapi tidak jarang sangat bertolak belakang. Gagasan atau ide tentang toleransi mensyaratkan keterbukaan diri terhadap "hidup dalam perbedaan dan konflik yang terjadi secara terus-menerus".

Hidup adalah menekuni praktik tindakan hari demi hari dalam suasana saling menghormati perbedaan yang tidak dapat benar-benar tuntas dipertemukan. Oleh karena itu sangat mudah bagi kelompok-kelompok tertentu yang malas mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada untuk mengkorupsi toleransi menjadi sikap atau tindakan represif (Forst, 2003). Mereka mempersuasi orang lain dengan kata-kata yang manis dengan tujuan memaksa orang lain mengalah demi kepentingan mereka sendiri. Dewasa ini, benturan antar peradaban yang berbeda (canggih vs sederhana; kota vs desa; pendidikan tinggi vs pendidikan rendah; pemilik modal vs pekerja; tuan vs hamba; pemimpin agama vs umat beragama) merupakan sumber konflik, bukan ekonomi (Huntington, 1993). Untuk sementara ini, toleransi disebut-sebut sebagai satu-satunya alat untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Konsep toleransi dari dirinya sendiri tidak mengindikasikan bahwa toleransi menghilangkan perbedaan. Konsep toleransi membuat seseorang atau suatu kelompok tertentu untuk mencintai pihak yang lain dan yang sama sekali berbeda dari dirinya/mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggali secara ontologis apa syarat-syarat toleransi, secara aksiologis apa batas-batas toleransi, dan secara teleologis apa kebermaknaan adanya toleransi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian atau objek material dari studi adalah fenomena toleransi. Analisis data menggunakan *content analysis*. Analisis isi adalah metode menganalisis pesan komunikasi tertulis, verbal atau

visual. Artikel, surat kabar, dan majalah dijadikan bahan analisis. Lalu, hasil analisis ditata secara yang sistematis dan objektif untuk menggambarkan fenomena toleransi. Analisis isi memungkinkan adanya pengujian isu-isu teoritis untuk meningkatkan pemahaman data. Artikel ini akan menganalisis konsep toleransi dan bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa toleransi bersumber dari konsep diri seseorang dalam memandang orang-orang di sekitarnya. Artikel berikut meninjau ide-ide di balik istilah toleransi. Toleransi memiliki keluasan dan kedalaman makna. Kata-kata yang relevan dengan tema disaring sehingga terkumpul beberapa gagasan berkenaan dengan tema. Diasumsikan bahwa ketika diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama, kata, frasa, dan sejenisnya memiliki makna semantik yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa toleransi tumbuh sebagai bagian dari kepribadian manusia. Ketika manusia mampu merangkul toleransi, maka ada jaminan pelestarian segala perbedaan dan segala macam konflik dapat terus berlangsung secara konstruktif. Keduanya harus ada demi kemanusiaan. Sistem nilai yang dipilih oleh orang tua bagi anak-anaknya mempengaruhi penghargaan yang dinikmati individu dalam masyarakat. Individu yang tidak toleran melampirkan semua nilai simbolis pada sejumlah kecil atribut dan tidak menghormati orang yang berbeda. Orang yang toleran memiliki nilai-nilai yang beragam dan menghormati perubahan sosial. Pembentukan nilai-nilai yang melekat pada toleransi mengidentifikasi keadaan di mana toleransi muncul secara evolusi karena proses pembatasan.

1. Konsep Toleransi

Konsep toleransi beragama baik intra maupun antar level mengandaikan adanya berbagai klaim agama. Ini juga mempengaruhi bahwa konteksnya pluralistik, yang umumnya harus mendorong persamaan hak, penerimaan, akomodasi, dan situasi hidup (Benson, 2016). Dalam konteks ini, “toleransi sejati (sebagai suatu kebajikan, selaras dengan kebajikan lain seperti kerendahan hati, rasa hormat dan sopan santun), dimana setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mempertahankan pemahamannya tentang apa yang baik bagi manusia secara rasional.

Wahyudi (2019), dengan pendekatan fenomenologis, menemukan bahwa perilaku *genduren* yang melibatkan umat beragama lain merupakan perilaku sosial yang menunjukkan inti dari konsep toleransi dalam masyarakat pluaristik. Masyarakat Jawa yang beragama Hindu di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi pada perayaan Hari Raya Galungan dan masyarakat Jawa transmigran yang beragama Islam di Lampung Timur menjadi contoh penerapan konsep masyarakat Jawa yang mengajarkan hubungan baik dengan lingkungan, alam, dan sesama manusia (Wahyudi, 2019).

Oleh karena itu, toleransi formal akan menyiratkan bahwa setiap orang dalam suatu sistem secara wajar bebas untuk mengejar keyakinan agamanya tanpa campur tangan negara. Masyarakat sendiri yang akan berproses mengenai kebermakaan hidup bersama. Dengan demikian, negara netral tentang agama dalam kaitannya dengan pasal 2 dan 18 Deklarasi Universal PBB 1948 tentang Hak Asasi Manusia (Deklarasi selanjutnya).

Etimologi bahasa Latin dari toleransi berarti "menanggung", "menderita", "bertahan". Motif utama “memikul beban” seperti dikemukakan oleh Louis Hammann, menunjukkan fakta bahwa manusia ditoleransi oleh Tuhan, seperti dalam “mengangkat dan memikul” mereka. Karena itu manusia harus bisa bertoleransi satu sama lain seperti halnya Tuhan. Terhadap kepercayaan umum bahwa ini mungkin merupakan tanda kapasifan, Benson berpendapat bahwa "toleransi sebagai penderitaan atau bertahan" membawa beban aktif, meskipun respons yang sulit (Benson, 2016).

Memahami toleransi sebagai “bertahan dengan” atau “mengizinkan” mengindikasikan adanya keterputusan antara “toleransi dan rasa sakit,” yang secara inheren bertentangan dengan etimologinya. Dalam konteks makna katanya, toleransi bukanlah ketidakpedulian karena ketidakpedulian mengindikasikan kurangnya keyakinan terhadap keyakinan dianutnya. Penderitaan karena toleransi tingkat komitmen seseorang terhadap keyakinan agamanya. Toleransi melibatkan spektrum yang luas, yaitu: keterbukaan, relevansi, dan kontribusi. Toleransi adalah istilah perilaku, yang menyarankan respons aktif dalam tindakan nyata (Firmanto, 2021). Temuan penelitian Wahyudi (2019) menunjukkan sedikitnya ada tiga hal yang mengkonfirmasi konsep di atas. Pertama, falsafah Jawa *teposeliro* menjadi inti konsep sosial masyarakat Jawa. Kedua, model religiusitas masyarakat yang menekankan kerukunan. Ketiga, para pendahulu mengembangkan lingkungan yang bersifat inklusif sehingga membuka hubungan yang harmonis dengan sesama warga.

Seseorang dapat membedakan antara toleransi negatif dan positif. Toleransi negatif adalah pengakuan seseorang terhadap keyakinan dan praktik keagamaan orang lain tanpa perasaan peduli dengan keberadaan mereka. Sebaliknya, toleransi positif berarti memberi wadah atau kondisi bahwa keyakinan agama orang lain sebagai sebuah keberadaan, yang sama validnya dengan pendekatan keagamaan yang ia hayati. Informan dalam penelitian Wahyudi (2019) menggambarkan toleransi secara positif dengan mengatakan, “Sutawi, salah satu anggota masyarakat Jawa transmigran yang beragama Kristen di Lampung Timur, yakin bahwa meskipun penganut agama minoritas di daerah tersebut, ia tidak merasa didiskriminasi atau diisolasi oleh pemeluk agama mayoritas. Ia mengakui bahwa tradisi *genduren* memang sangat kental dengan nuansa Islami. Namun ia tidak mempermasalahkannya hal tersebut, baginya meskipun berada di tengah kegiatan umat Islam, bukan berarti secara otomatis agama yang dianutnya menjadi luntur”.

Penuturan Sutawi menunjukkan bahwa aspek penghayatan agama meliputi juga aspek “rasionalisasi” agama. Sutawi memandang agama bukan dari sisi “magis” namun dari perspektif humanis. Ia tidak memandang ritual secara keagamaan (*genduren*) sebagai sesuatu yang penuh dengan kekuatan magis. Tetapi cenderung kepada satu nilai yang universal dan diterima oleh semua agama, yakni hidup rukun berdampingan dalam bermasyarakat. Konsep ini sesuai dengan ciri khas masyarakat modern yang menghargai keragaman, yang dengan jelas membedakan mereka dari masyarakat tradisional (Firmanto, 2017a). Sementara “manusia tradisional” tunduk pada norma sosial dan memberikan sanksi berat kepada mereka yang menyimpang, “manusia modern” menerima perubahan sosial sebagai realita yang diterima. Toleransi dapat mempromosikan hidup berdampingan secara damai antara kelompok yang beragam dan mendukung aktualisasi diri individu (Abror, 2020).

Minoritas menikmati tingkat perlindungan yang substansial hanya dalam masyarakat yang toleran, dan perlindungan itu memperkuat hak-hak politik demokratis. Sementara toleransi mungkin diinginkan pada prinsipnya, tidak semua masyarakat kontemporer dapat dikualifikasikan sebagai toleran. Mendukung ini, bukti empiris datang dari *World Values Surveys* —survei yang representatif tentang sikap, dimulai pada 1980-an dan mencakup banyak negara (Nurdin, 2022; Muhammad, 2022). Survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat praindustri saat ini menunjukkan tingkat toleransi yang sangat rendah. Perbedaan lintas negara sehubungan dengan toleransi biasanya dijelaskan oleh sosiolog dan ilmuwan politik yang menggunakan apa yang disebut teori modernisasi budaya. Teori modernisasi budaya menyatakan bahwa seiring dengan kemakmuran ekonomi dan meluasnya jangkauan pasar, toleransi yang tumbuh terhadap keragaman manusia mengubah orientasi individu ke komunitas.

Sistem nilai individu menentukan seberapa besar penghargaan yang dia berikan kepada dirinya sendiri dan orang lain (Firmanto, 2017b). Pada gilirannya, harga diri dan penghargaan yang diterima dari orang lain adalah argumen dari fungsi utilitas individu dalam teori pertukaran sosial. Seseorang menjadi toleran jika dia memberikan nilai simbolis tidak hanya pada karakteristiknya sendiri tetapi juga pada karakteristik yang tidak dia miliki — tetapi dimiliki orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak toleran memiliki sistem nilai yang tidak menghormati sifat dan gaya hidup yang bukan miliknya.

Toleransi merupakan konsep penting ketika masyarakat mengalami perselisihan atau konflik kepentingan. Penyalahgunaan kata toleransi terjadi ketika kata tersebut hanya berarti tidak ada konflik di lapisan permukaan kehidupan masyarakat. Padahal, potensi konflik itu seperti sekam yang terbakar. Menabur benih toleransi tidak hanya bertujuan menghilangkan perbedaan atau menghilangkan konflik. Toleransi merupakan hakikat dari keberadaan masyarakat itu sendiri.

Lebih sering daripada tidak, intoleransi sangat ditolak demi toleransi hanya karena keyakinan bahwa yang terakhir menghasilkan peluang yang lebih baik untuk hubungan antar pribadi dalam masyarakat majemuk. Dalam pengertian ini toleransi berarti mengizinkan orang lain menjalankan keyakinan agama mereka tanpa hambatan. Sementara istilah “mengizinkan” membawa makna legal yaitu otorisasi secara politik, toleransi hanya berarti tidak adanya keberatan daripada persetujuan yang tulus atas keyakinan agama orang lain (Nurdin, 2022). Oleh karena itu argumen dari makalah ini bahwa toleransi sudah terbagi antara yang berkuasa dan yang kurang berkuasa, yang diistimewakan dan yang kurang diistimewakan.

2. Syarat-syarat Toleransi

Toleransi membiarkan bahkan menjamin perbedaan-perbedaan dan segala konflik tetap ada (Nurdin, 2022; Muhammad, 2022). Perbedaan dapat dipertahankan dan konflik dapat dibenarkan jika dalam perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik tersebut, martabat kehidupan semua ciptaan tetap memperoleh tempat. Bahkan, toleransi tidak sekedar membiarkan perbedaan itu hidup dan konflik tetap ada. Toleransi yang sesungguhnya akan memupuk agar perbedaan itu semakin tajam, semakin kelihatan, dan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika atas nama toleransi, perbedaan-perbedaan dan konflik menjadi samar bahkan hilang, maka toleransi kehilangan esensinya. Ia tidak memiliki makna lagi. Toleransi dapat berubah menjadi intoleransi. Sebagai contoh, ketika menyangkut kebijakan kesejahteraan (*welfare policies*), negara demokrasi harus membuat yakin bahwa warganya (dan masyarakat pada umumnya) dilindungi dari berbagai bentuk dominasi atau eksploitasi karena konsep tertentu mengenai hukum, politik atau sosial dan ekonomi. *Paternalistic policy* bisa jadi merupakan eksploitasi terhadap sekelompok orang (Forst, 2020).

Collier (1998) menyatakan bahwa toleransi merupakan cara berpikir dan cara berada seseorang dalam dunia yang pluralistik. Secara filosofis, toleransi adalah upaya "mentransendensikan cara pandang" sehingga didapatkan persetujuan yang rasional untuk kebersamaan sosial. Secara politik, toleransi merupakan langkah mengadopsi konsep yang baik tentang hidup secara keseluruhan. Secara yuridis, toleransi adalah penerimaan terhadap aturan dan batasan minimal dalam interaksi sosial (bukan masalah substansi). Sebagai contoh, di jalan-jalan kota besar, orang mengendarai mobil mereka karena berbagai alasan dan ke tujuan yang berbeda. Ada potensi masalah di tengah lalu-lalang kendaraan karena jalanan ramai.

Perjalanan yang berbeda memotong satu sama lain. Orang-orang dengan tujuan berbeda-beda menempuh jalan yang berbeda dan melalui aneka persimpangan. Jika dua kendaraan melewati persimpangan yang sama pada saat yang sama, mungkin terjadi

tabrakan. Salah satu atau kedua pengemudi mungkin gagal mencapai tujuannya. Lebih lanjut, pastilah, salah satu atau keduanya terluka, cacat, atau mati di tempat. Kendaraan mereka yang rusak bisa juga tidak dapat diperbaiki lagi. Inti dari aturan lalu lintas adalah, pertama dan terutama, untuk mencegah tabrakan semacam itu, dan memastikan bahwa jalan tersebut aman bagi pengemudi dan kendaraannya. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan mereka. Jika intinya adalah “mengutamakan keselamatan”, hal itu dapat diakomodasi dengan mewajibkan semua pengemudi untuk melaju dengan kecepatan 40 km/jam di dalam kota atau dengan mewajibkan mereka untuk menepi di setiap persimpangan agar ada kepastian bahwa jalanan telah aman. Tetapi kemudian, hanya sedikit saja orang yang dapat mencapai tujuan yang ingin mereka capai pada waktu yang sama seperti saat mereka ingin mencapainya.

Untungnya, tujuan dari peraturan lalu lintas yang baik juga untuk memastikan bahwa setiap orang dapat melanjutkan ke tujuan mereka secepat mungkin, dengan syarat bahwa maksud untuk sampai di tempat tujuan tersebut tidak boleh membuat orang lain gagal untuk sampai dengan cepat dan selamat ke tujuan mereka. Dengan kata lain, jalanan dan aturan yang mengatur penggunaannya berupaya mengakomodasi tujuan setiap orang dalam menggunakannya. Aturan mengatakan: “Ke mana pun Anda ingin pergi atau mengapa, kami akan mengizinkan Anda untuk melanjutkan ke tujuan Anda. Masing-masing dari Anda hanya harus menerima beberapa batasan yang diperlukan untuk memperluas hak ini kepada setiap pengemudi lainnya”.

Kita memberlakukan batas kecepatan atau kita meminta orang untuk mematuhi lampu lintas karena kesadaran mengenai realita kehidupan bersama yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam konteks tersebut. Kita memiliki aturan tentang hak jalan di persimpangan yang ruwet atau kita menegakkan jarak aman berkendara, aturan mendahului kendaraan yang lain karena keyakinan bahwa tiap-tiap orang memiliki tujuan perjalanan yang akan dicapai. Mungkin tidak ada yang sampai ke tujuannya secepat yang dia pikirkan, seperti misalnya jika dia memiliki jalan sendiri. Mungkin tidak ada yang memiliki jenis perjalanan yang dia sukai. Namun pembatasan tersebut adalah wajar. Tidak ada orang yang mereka hancurkan melalui kegiatan mengemudi. Aturan hanya mengubah cara setiap orang mengejar tujuannya di jalanan sehingga membuat penggunaannya sesuai dengan penggunaannya oleh orang lain.

Berkenaan dengan contoh mengenai pengemudi di jalanan, pernyataan bahwa "sikap toleran itu baik" dan "intoleran itu jelek" perlu mendapat perhatian (Webb, 1997). Jika sampai saat ini, kita selalu menganggap "toleran itu baik" dan "intoleran itu jahat", sudah saatnya pemikiran tersebut dibongkar. Dua istilah tersebut mendapatkan penafsirannya dalam konteks kasus. Apakah sikap menolak sama sekali kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak balita pantas dianggap sebagai sikap intoleran? Mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa "memaksa" adalah tindakan intoleran. Tetapi, apakah "memaksa/ mendesak" orang agar tidak menganiaya orang lain dapat dikategorikan sebagai sikap intoleran dan jahat? Sebaliknya, apakah menerima atau menyetujui kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak balita pantas disebut sebagai sikap toleran? Mungkin ada di antara kita yang menilai "sikap menerima dan menyetujui" adalah sikap toleran. Tetapi, apakah menyetujui penganiayaan dan penyiksaan dapat dikategorikan sebagai sikap toleran atau baik?

Syarat lain yang dibutuhkan untuk terjadinya toleransi adalah keterbukaan dari pihakku dan keterbukaan dari pihak *liyan* (*others*). Kedua sisi keterbukaan tersebut harus disertai dengan rasa saling percaya (*trust*) (Thomassen, 2006). Dalam kondisi saling percaya tersebut, setiap orang diharapkan dapat mengakui dan menerima adanya "perbedaan-perbedaan kultural dan ketidaksesuaian". Keduanya tidak perlu dianggap sebagai keanehan. Keduanya adalah "unsur yang sah dan tidak terhindarkan" dalam relasi

antar manusia (Erspamer, 1997). Sebagai catatan, konsep pemahaman toleransi berasal dari tradisi kekristenan. Dalam iman mereka, Tuhan mencintai manusia dengan cara mentolerir kelemahan mereka (Yan, 2012). Itulah cinta yang tertinggi, cinta yang tidak setara. Tuhan mencintai pihak-pihak yang sama sekali berbeda dari-Nya dan sama sekali tidak dapat membalas cinta yang sudah mereka terima. Pemahaman tersebut tidak lepas dari persoalan. Gagasan tentang Tuhan yang mentolerir manusia seolah-olah menjadi afirmasi atas pihak-pihak yang toleran dapat menganggap diri mereka lebih baik dari pihak lain yang ditolerir.

Syarat toleransi yang selanjutnya adalah kelompok atau pihak yang kuat perlu mengakomodasi kelompok-kelompok yang kecil atau lemah (Ferretti & Lægaard, 2013). Jika akomodasi tersebut bersyarat, maka toleransi justru dapat memupuk perendahan terhadap pihak lain. Mengapa? Karena, syarat-syarat tersebut akan dibebankan kepada pihak-pihak yang kecil atau lemah. Relasi antara pihak yang kuat dan pihak yang kurang kuat selalu menyisakan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak yang kurang kuat. Tidak ada pihak yang lemah yang berani mengajukan syarat kepada pihak-pihak yang memberi bantuan kepadanya. Sebagai contoh, mungkinkah pada saat sebelum menerima uang, seorang pengemis mengajukan syarat kepada pihak-pihak yang akan memberinya uang, "Anda harus hormat kepada saya saat memberikan uang itu kepada saya?" Oleh karena itu, dalam konteks hidup bersama yang menjunjung nilai kemerdekaan-kesetaraan-persaudaraan, istilah toleransi tidak selalu tepat digunakan.

Immanuel Kant menawarkan konsep hospitalitas. Menurut Kant, hospitalitas memiliki pengertian yang lebih menghargai kesetaraan pihak-pihak yang saling bertemu. Bertindak secara eksternal sedemikian rupa sehingga penggunaan bebas dari kehendak seseorang sesuai dengan kebebasan setiap orang menurut hukum universal. Mereka saling menyadari perlunya mengusahakan perdamaian yang bertahan lama (*perpetual peace*) (Kant, 1927). Moral imperatif dari Kant menyatakan bahwa keutuhan tujuan (*kingdom of ends*) adalah "persatuan sistematis dari makhluk rasional yang berbeda-beda di bawah hukum umum", dan kerajaan tujuan sebagai "keseluruhan dari semua tujuan dalam hubungan sistematis (keseluruhan baik makhluk rasional adalah tujuan dalam diri mereka sendiri dan juga dari tujuan pribadi yang masing-masing yang ditetapkan sebelum dirinya sendiri)" (Kant, dalam Paton, 1991). Dengan sendirinya, keharmonisan adalah hubungan antara tindakan, bukan hubungan langsung dengan finalitasnya. Tujuan (*ends*) muncul ketika kita mempertimbangkan kecukupan: hubungan antar *ends* menurut gagasan Kantian mengenai *kingdom of ends*. Ini adalah masalah berapa banyak ruang tersisa untuk kebebasan kita. Dan itu pada gilirannya bukan hanya pertanyaan tentang berapa banyak tindakan diizinkan untuk masing-masing dari kita. Ini adalah pertanyaan mengenai kualitas minimum yang diizinkan dalam kaitannya dengan tujuan yang kita ambil sendiri untuk dikejar.

Diskusi mengenai toleransi dalam konteks Kantian mengenai *kingdom of ends* selalu memiliki konteks sosial dan historis berkenaan pandangan tentang masyarakat yang baik. Orang yang bijaksana tidak membentuk konsepsi mereka tentang kehidupan yang baik secara terpisah dari setiap pemikiran tentang apa masyarakat yang baik akan. Untuk kebanyakan orang, pandangan bahwa tiap-tiap orang berutang kepada orang lain akan membentuk etika pribadi mereka (Setyabudi, 2020). Konsep toleransi mengindikasikan gagasan mengenai keberhutangan satu sama lain dalam masyarakat. Secara ontologis, konsep toleransi merujuk kepada definisi manusia sebagai individu yang bertujuan yang pada suatu masa di tempat tertentu hidup bersama. Kehidupan manusia dalam masyarakat bukanlah fragmentasi menurut kelompok atau golongan. Toleransi adalah teori tentang cara terbaik untuk mengatur sebuah masyarakat manusia (Setyabudi, 2020).

Forst (2018) menyatakan bahwa toleransi selalu memiliki “konteks toleransi” tertentu. Gagasan ini merujuk, di satu sisi, hubungan antara tolerator dan yang ditoleransi: untuk misalnya, antara orang tua dan anak, antara teman, antara anggota komunitas agama, antar warga negara, dan bahkan antara “orang asing”. Tergantung pada konteks ini, alasan toleransi dan batasannya bisa berbeda. Di sisi lain Di sisi lain, untuk menyebutkan beberapa kemungkinan saja, muncul pertanyaan apakah subjek toleransi adalah individu atau kelompok atau “negara”, serta apakah objek toleransi adalah praktik, tindakan tunggal, atau kepercayaan.

3. Perjuangan Nilai dalam Toleransi

Dalam perdebatan kontemporer tentang ide dan masalah masyarakat multikultural, konsep toleransi memainkan peran utama tetapi sama sekali tidak jelas apa yang sebenarnya menjadi saripatinya. Perannya memang tidak terbantahkan, tapi ada banyak makna di dalam konsep toleransi (Setyabudi, 2020). Bagi sebagian orang, toleransi adalah keadaan yang diinginkan untuk saling menghormati atau menghargai martabat kemanusiaan, sedangkan bagi orang lain toleransi berarti praktik paling pragmatis mengenai hubungan antara orang atau kelompok dalam masyarakat. Konsekuensi praktik pragmatis adalah kemunculan praktik represif.

Forst (2018) mengajukan tesis bahwa *toleration is a virtue of justice and a demand of reason*. Pandangan Forst tersebut memiliki implikasi epistemologis, yaitu toleransi adalah suatu keutamaan akal budi. Forst (2018) berkeyakinan bahwa sangatlah penting untuk konsep toleransi keberadaan keyakinan yang ditoleransi atau praktik dinilai salah atau buruk. Gagasan ini merujuk ke “komponen keberatan” (*objection component*). Jika komponen ini tidak ada, akan muncul baik ketidakpedulian (indiferen) atau penegasan (afirmasi) - dua sikap yang tidak sesuai dengan toleransi. Keberatan harus substantif secara normatif, tetapi tidak harus terbatas pada alasan “moral”; karena, ketika membahas konsep toleransi umumnya, tidak pantas untuk mengecualikan bentuk lain dari kritik normatif, misalnya kritik estetika.

Forst (2018) menyatakan bahwa toleransi juga membutuhkan aspek yang positif, yaitu “komponen penerimaan” (*acceptance component*). Komponen penerimaan tidak meniadakan penilaian negatif tetapi memberikan alasan positif tertentu yang mengalahkan persepsi negatif yang ada dalam konteks yang relevan. Jadi, praktik atau keyakinan tersebut adalah dianggap salah, tetapi tidak selalu berarti salah. Dalam kasus di mana baik komponen keberatan dan komponen penerimaan disebut “moral”, kedua komponen tersebut mengarah kepada pengertian mengenai bagaimana suatu tindakan tertentu itu bisa benar secara moral atau bahkan ada kewajiban moral untuk mentolerir apa yang secara moral salah atau buruk. Untuk menyelesaikan paradoks ini, diperlukan konsepsi toleransi yang menjelaskan arti “moral” - dan “benar” versus “salah dan buruk” - dalam perbedaan cara mempersepsi sebuah tindakan.

Forst (2018) berketetapan bahwa konsep toleransi mensyaratkan gagasan “batas toleransi” tertentu. Gagasan “batas toleransi” terletak pada titik di mana alasan penolakan menjadi lebih kuat dari alasan penerimaan (sesuatu yang masih menyisakan pertanyaan tentang cara intervensi yang tepat). Penting untuk melihat alasan untuk penolakan tidak harus identik dengan alasan keberatan dalam gagasan “batas toleransi” ini. Gagasan ini mengindikasikan bahwa ada beberapa alasan independen yang terhubung secara internal dengan alasannya penerimaan, yang menentukan kondisi dan batasan tertentu untuk penerimaan itu. Dalam konteks gagasan “batas toleransi”, dapat dilihat bahwa ada dua batasan yang terlibat. Yang pertama terletak di antara ranah normatif praktik dan keyakinan yang disetujui seseorang, dan ranah praktik dan keyakinan yang dapat ditoleransi yang ditemukan salah tetapi masih dapat diterima dengan cara tertentu. Batas

kedua terletak di antara alam yang terakhir ini dan alam yang tidak dapat ditoleransi, yaitu ditolak keras (batas toleransi berbicara dengan benar).

Konflik adalah dua tindakan bertentangan. Konsep konflik memuat arti bahwa kinerja salah satu dari mereka mengganggu kinerja yang lain. Sebagai contoh, ada dua orang yang berjuang untuk menggunakan alat yang sama pada saat yang sama – adalah jenis konflik yang paling jelas. Konflik tidak sama dengan oposisi (atau ketidaksetujuan) (Waldron, 2018). Konsep oposisi mengindikasikan bahwa dua tindakan itu diilhami oleh cita-cita yang bersaing. Tindakan oposisi adalah bahwa masing-masing bertentangan melalui tindakan yang berbeda, atau salah satu dari mereka menginginkan perilaku tertentu tidak akan terjadi. Saya mungkin menentang atau tidak menyetujui perilaku seseorang meskipun sebenarnya saya tidak setuju. Hal tersebut tampak dalam toleransi liberal: sebagai seorang liberal, saya mentolerir sesuatu meskipun saya tidak menyetujuinya.

Praktik toleransi sepatutnya berlangsung tanpa dilatarbelakangi oleh perasaan kasihan dan tanpa memandang lemah pihak lain (Kellner, 2021). Praktik toleransi memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap martabat manusia. Seperti apa pun bentuk dan penampakan fisik manusia, toleransi menempatkan mereka pada status martabat yang sama. Konsep tersebut berdiri tegak di atas pondasi kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendirian melainkan selalu ada yang lain. Martabat mereka tidak ditentukan oleh faktor tambahan seperti kekayaan, kecerdasan, penghargaan, dan pangkat. Ia adalah bagian dari kodrat manusia. Semua manusia memilikinya meski pun dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Pihak-pihak di luar diri seseorang hanya membantu mempertegasnya. Dengan demikian, toleransi merupakan kondisi sikap pribadi seseorang yang bermartabat.

Filsafat Stoa mewariskan konsep toleransi yang dimengerti sebagai daya tahan seseorang terhadap sesuatu yang menimpanya (Lombardini, 2015). Pengikut Stoicisme membentuk sempurna melalui pengekangan keinginan, askese, dan pemenuhan kewajiban moral. Moral Stoa menuntut pengikutnya untuk sanggup menanggung konsekuensi dari upaya mengejar keutamaan. Kesanggupan tersebut tidak harus dipengaruhi oleh pihak lain, kekuasaan, maupun perbedaan-perbedaan yang ada. Jika satu sama lain saling memiliki kesanggupan tersebut, keutamaan yang dikejar itu akan mewarnai kehidupan publik. Menurut Stoicisme, kebijaksanaan seseorang seharusnya mengubah perilakunya karena pikiranlah yang mengarahkan kehidupan pribadi. Dalam konteks publik, akal sehat masyarakat seharusnya mengubah perilaku hidup masyarakat karena masyarakat yang baik tersusun dari sintesis akal sehat yang dipraktikkan (*rational society*). Menurut Forst (2018), paradoks lain muncul di sini, yaitu toleransi itu perlu menyiratkan intoleransi terhadap mereka yang dipandang tidak dapat ditoleransi dan, cukup sering, sebagai tidak toleran seperti yang didefinisikan oleh batas-batas tersebut. Konsep toleransi tidak masuk akal tanpa batasan tertentu, meskipun segera setelah ini secara substantif didefinisikan, toleransi tampaknya berubah menjadi intoleransi. Dengan demikian tidak ada toleransi yang “sejati”. Untuk menghindari paradoks ini, sebuah konsepsi tentang toleransi harus mampu menunjukkan seberapa jauh batas-batasnya dapat ditarik secara timbal balik cara yang dapat dibenarkan dan tidak sewenang-wenang.

Implementasi konsep toleransi tidak dapat dihasilkan dari paksaan, karena subjek yang mentoleransi kemudian akan berada di bawah ketidakmungkinan untuk menyuarakannya keberatan dan bertindak sesuai dengan itu (Forst, 2018). Jika ini masalahnya, mereka hanya akan melakukannya karena “bertahan” atau terpaksa “menderita” karena praktik atau keyakinan tertentu yang membuat mereka tidak berdaya. Namun, untuk menyimpulkan dari sini, pihak yang bertoleransi harus berada dalam posisi dominan secara sosial, memiliki kekuatan untuk mengintervensi praktik-praktik yang

tidak dibenarkan. Kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuasaan jenis ini mungkin masih toleran dan yakin bahwa dalam kasus di mana toleransi memiliki kekuatan seperti itu tidak akan menggunakannya untuk merugikan orang lain. Realita ini menunjukkan bahwa toleransi memuat makna sebagai praktek dalam kehidupan riil dan sebagai sikap dalam akal budi. Praktik politik-hukum dalam negara yang menjamin kebebasan tertentu untuk minoritas dapat disebut toleran, seperti juga pribadi sikap menerima praktik-praktik tertentu dianggap tidak menyenangkan, misalnya di mana negara memberikan tertentu hak atas minoritas meskipun mayoritas warganya mungkin tidak setuju dengan kebijakan seperti itu, sementara pemerintah bertindak atas dasar motif strategis semata. Analisis toleransi yang difokuskan pada tataran politik-struktural koeksistensi damai dari berbagai kelompok budaya dengan demikian membuka jalan pertanyaan krusial seperti apa sikap atau kebijakan toleransi warga negara suatu negara dapat diharapkan dari satu sama lain.

Forst (2018) mengajukan empat konsep toleransi. Konsep toleransi yang pertama adalah konsep izin (*permission conception*). Di sini, toleransi adalah hubungan antara otoritas atau mayoritas dan perbedaan pendapat, minoritas “berbeda” (atau berbagai minoritas). Toleransi kemudian berarti bahwa otoritas (atau mayoritas) memberikan izin yang memenuhi syarat kepada anggota minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat bahwa minoritas menerima posisi dominan otoritas (atau mayoritas). Konsepsi izin adalah salah satu yang kita temukan dalam banyak dokumen sejarah dan preseden yang menggambarkan politik toleransi (seperti *Edict of Nantes* 1598 atau *Toleration Act* 1689).

Konsepsi kedua, yang bisa disebut konsepsi koeksistensi (*co-existence conception*), mirip dengan konsepsi izin dalam memandang toleransi sebagai cara terbaik untuk mengakhiri atau menghindari konflik. Di sini juga toleransi tidak dipahami sebagai nilai itu sendiri atau sebagai kewajiban moral: ia terutama dibenarkan dengan cara pragmatis-instrumental. Perbedaan kedua konsepsi tersebut terletak pada konstelasi kekuasaan di antara para pihak. Sehubungan dengan konsepsi ko-eksistensi, keadaannya bukanlah situasi di mana otoritas atau mayoritas berdiri di atas minoritas, melainkan salah satu kelompok, kira-kira setara dalam kekuasaan, yang melihat bahwa demi perdamaian sosial dan toleransi kepentingan mereka sendiri. adalah yang terbaik dari semua alternatif yang mungkin (contoh historisnya adalah Perjanjian Perdamaian Augsburg 1555). Kelompok-kelompok ini lebih memilih hidup berdampingan secara damai daripada konflik dan menyetujui kompromi timbal balik, dengan *modus vivendi* tertentu.

Konsepsi toleransi yang ketiga – konsepsi rasa hormat (*respect conception*) – adalah salah satu di mana pihak-pihak yang bertoleransi satu sama lain menghormati satu sama lain dalam arti yang lebih timbal balik: atas dasar moral mereka menganggap diri mereka sendiri dan orang lain sebagai warga negara di mana anggota dari semua kelompok – mayoritas atau minoritas – harus memiliki status hukum dan politik yang setara. Konsepsi keempat tentang toleransi - konsepsi harga diri (*esteem conception*)-menyiratkan gagasan yang lebih penuh dan lebih menuntut tentang pengakuan timbal balik antara warga negara daripada konsepsi “menghormati”. Oleh karena itu, bersikap toleran tidak berarti menghormati anggota dari bentuk kehidupan budaya atau agama lain sebagai sederajat secara moral dan politik meskipun menolak cara hidup etis mereka. Sebaliknya, itu berarti memiliki semacam penghargaan etis untuk mereka; yaitu, menganggap keyakinan mereka sebagai konsepsi bernilai etis yang - meskipun berbeda dari keyakinan seseorang - dalam beberapa hal menarik secara etis dan dipegang untuk alasan yang baik.

Keempat konsep Forst di atas, mengarahkan kita kepada praktik toleransi di Indonesia. Secara umum, kita dapat memahami toleransi dengan dua cara. *Satu*, secara umum atau level praktis. Toleransi merupakan pengakomodasian cara yang salah sebagai

akibat dari tidak adanya alternatif yang lain. Ingat, kita tidak bisa mengakomodasi suatu cara yang ideal sebagai contoh dari toleransi. Toleransi selalu diberikan kepada hal-hal yang negatif atau sedikit negatif karena tidak adanya alternatif lain yang lebih baik. *Dua*, level reflektif. Toleransi adalah pengakomodasian kesamaan normatif yang diperoleh dari refleksi atas tindakan moral (Tan, 2011). Toleransi mewujudkan sikap "ada bersama secara tenang" (*quiet coexistence*) atau "menjaga jarak dengan penuh hormat" (*respectful distance*) terhadap kelompok-kelompok yang kecil dan tidak signifikan (Lee, 2014). Dalam hal ini, toleransi menjadi praktik pihak yang punya kuasa terhadap kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Gagasan ini jelas memperlihatkan bahwasannya toleransi secara tetap memuat ketidaksetaraan.

Toleransi bernilai positif. Ia melestarikan "yang berbeda dan lain" asalkan ada standar normatif bersama (Mensch, 2009). Sebagai contoh, secara normatif, tidaklah mungkin melestarikan kebusukan atau kebobrokan. Toleransi adalah satu-satunya dasar argumentasi yang membuat pluralisme menjadi masuk akal (Puri, 2021). Oleh karena itu, intoleransi agama-agama dan cara pandang fundamentalis tetap ada bukan karena agama-agama itu berbeda, melainkan karena penelitian tentang konflik agama-agama berhenti di permukaan dan kurang memberitempat pada rasa perasaan manusiawi (Velassery, 2021). Artinya, dalam negara yang plural, rasa-perasaan anggota agama tertentu tidak perlu dijauhkan dari yang lain. Orang-orang beragama perlu dibiasakan untuk mempraktikkan agamanya di tengah-tengah para pemeluk agama yang lain.

Toleransi melestarikan "keterbukaan radikal" (Lacorne, 2019). Di dalamnya, orang memahami "yang berbeda dan lain" secara rasional dan membuka wawasan berdasar sikap hormat dan kesalingan. Toleransi melahirkan "rezim hospitalitas" yang menghancurkan pemisah antara diriku dan yang lain. Aku dan yang lain selalu berada dalam ruang hidup yang sama. Aku terbedakan dari yang lain. Tetapi kami tidak terpisahkan. Toleransi tidak cocok dengan cara pikir tertutup, bias, maupun yang serba mutlak. Ia tidak menutup diri dari yang lain. Ia tidak menilai pihak lain melainkan membiarkan pihak lain memperlakukan diri. Ia juga tidak memutlakkan apa pun. Keyakinan yang kita anggap benar sangat mungkin dapat keliru dan selalu dapat dipertanyakan kembali. Meski demikian, kebenaran itu ada. Kebenaran itu hanya dapat diraih menggunakan cara berpikir kritis. Alasannya, tiap orang punya kesalahan. Jika mereka, pada saat bertemu dengan yang berbeda dan lain, berani membicarakan segala sesuatu secara rasional, "kesalahan" masing-masing dapat dikoreksi dan kebenaran akan semakin dekat.

Toleransi memberi dua kesan kepada kita; tidak berbahaya (*to be tolerant*) dan keengganan melibatkan diri (*to tolerate*) (Glaser, 2014). Pada awal zaman modern, istilah yang dipakai adalah "*toleration*". Pada zaman modern, ia berubah menjadi "*tolerance*". Jadi, istilah toleransi mengalami pergeseran dari "kualitas diri yang sanggup dengan sabar menahan/menghadapi kesulitan" ke "kebaikan hati/keterbukaan". Kita harus selalu waspada, jika kita mentolerir sesuatu, hal itu berarti kita menolak sesuatu yang terkandung dalam sesuatu yang ditolerir.

Toleransi pernah dipahami sebagai tidak adanya penganiayaan secara terbuka terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan (Meza, 1981). Sampai sekarang, tentu masih ada yang berpandangan demikian. Tetapi, pemahaman negatif itu sudah saatnya ditinggalkan. Dalam toleransi, kita perlu memupuk cara hidup ketetanggaan yang sadar dan aktif, bahkan mungkin pro-aktif (Jenks, 1967). Ini dapat menjadi status kewarganegaraan yang mendukung kemajuan bersama. Setiap warga, dengan kapasitasnya masing-masing, perlu saling berkontribusi untuk pembangunan masyarakat. Kita perlu mengembangkan sikap "toleransi aktif". Jangan sampai kita hanya sekedar "tidak mengikuti aturan hukum yang diskriminatif" (toleransi pasif) atau "jujur mengakui

perbedaan dan jujur mendalami nilai-nilai obyektif agama dan kepercayaan selain miliknya sendiri" (Lester & Roberts, 2006). Toleransipasif tidak dapat diandalkan untuk melindungi umat beragama yang berbeda. Mendalami nilai-nilai obyektif agama lain juga hampir tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat umum. Percaya begitu saja kepada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan toleransi yang paripurna serta menetapkan batas-batasannya juga bukan tindakan yang bijaksana. Kita jangan hanya berpuas diri pada saat lembaga agama menentukan identitas- identitas agama sedangkan kita hanya duduk menunggu semua produk itu menjadi final dan dibagikan. Kita perlu ikut menyuarakan sikap ketidaksetujuan terhadap aturan, penetapan, atau sikap-sikap diskriminatif yang ada dalam masyarakat sipil maupun dalam konteks relasi agama-agama, bukan demi dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. Untuk sampai pada tahap toleransi aktif ini, pendidikan moral dituntut untuk mengajarkan komponen toleransi aktif secara serius. Dalam dunia politik, kita memahami toleransi sebagai usaha untuk memberlakukan hak-hak umat beragama kepada siapa pun, tanpa terkecuali (Modak & Sanders, 2005). Bagaikan hukum emas, tiap orang perlu melakukan kepada orang lain, apa yang ia ingin agar orang lain lakukan untuknya.

Bicara tentang toleransi, kita jangan sampai mengabaikan istilah toleransi internal (di kedalaman tiap agama terdapat kesamaan-kesamaan yang berlaku secara umum) dan toleransi eksternal (dapat menerima siapa pun untuk melakukan praktik hidup beragama mereka) (Spinner-Halev, 2006). Contoh toleransi eksternal ada dalam Hinduisme. Ia awal tidak menunjuk pada satu cara beriman yang seragam. Sejak awal, ia terbiasa dengan munculnya aneka macam aliran dan dapat menerimanya. Model toleransi ini sulit terjadi pada agama-agama yang beriman kepada Tuhan (yang satu), kelembagaan yang teratur, hirarki tertentu, dan Kitab suci tertentu.

UNESCO menetapkan batas toleransi sebagai penghormatan, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya manusia serta bentuk-bentuk ungkapan dan cara-cara menjadi manusia (1995). Ia dimajukan oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasanberpikir, kesadaran dan kepercayaan. Ia adalah harmoni dalam perbedaan. Ia adalah sikap positif yang mendukung keragaman. Maka, toleransi, keberagaman, dan kebebasan memiliki kaitan satu sama lain. Dengan bersikap toleran, keberagamandapat diungkapkan secara bebas dan menjadi lestari, bukan tertindas dan lenyap. Tindakan intoleran dipicu oleh rasa tidak suka (Jarman, 2016). Lembaga pendidikan perlu berperan aktif mengkondisikan peserta didik untuk berani memahami lebih dalam agama dan budaya yang bukan menjadi milik mereka sendiri. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut dapat membantu mengembangkan kohesi dalam masyarakat yang selalu berciri keragaman (Gallagher & Duffy, 2016).

Sikap toleran atau tindakan mentolerir memuat di dalamnya informasi tentang penolakan terhadap soal-soal tertentu (Mulligan, 2015). Oleh karena itu, kita tidak mungkin berkata; "Kami/saya mentolerir kebaikan". Dalam mentolerir, kita sudah pasti akan berkata; "Kami/saya mentolerir perbuatan/sikapmu yang buruk". Mekanisme yang terjadi dalam kehidupan bersama manusia selalu saja kita "mentolerir cara yang tidak ideal untuk mendapat sedikit kebaikan". Dengan demikian, sikap toleran merupakan fenomena yang kontekstual. Ia melibatkan tindakan-tindakan moral dalam keadaan-keadaan tertentu. Seseorang atau pihak- pihak tertentu dapat bersikap toleran pada saat dia/mereka berada dalam posisi lebih tinggi atau memiliki kuasa terhadap pihak yang diberi toleransi ("kuasa untuk boleh tidak sependapat/menolak"). Posisi yang lebih tinggi atau kuasa dalam hal ini tidak harus dipahami dalam konteks "kelompok mayoritas atau memiliki sumber daya yang tidak terbatas". Posisi yang lebih tinggi atau kuasa tersebut lebih tepat dimengerti dalam arti "orang/pihak yang diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan". Toleransi juga mengajukan syarat lain. Dalam dialektikanya, pihak yang

memberi toleransi dan yang menerimanya harus punya kepentingan/urusan yang sama. Sebagai contoh, seorang pimpinan perusahaan tidak punya kaitan dengan cara mandi kerbau liar. Oleh karena itu, meskipun ia menganggap mandi di sungai bukanlah praktik yang baik, cara mandi kerbau-kerbau liar bukanlah urusannya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

Kesimpulan

Segala pemahaman dan praktik toleransi sebagaimana telah diuraikan di atas membawa kita sampai pada beberapa pertimbangan berikut ini. *Satu*, pada kondisi tertentu toleransi dapat diberikan kepada suatu tindakan dan ia dapat ditarik kembali pada kondisi yang lain. Kita boleh dan dapat memutuskan untuk tidak (lagi) mentolerir tindakan tertentu. Jika kita memutuskan untuk tidak mentolerir sesuatu, maka kita perlu/dituntut melakukan intervensi tertentu terhadap tindakan tersebut. Jika kita tidak punya kekuatan untuk melakukan intervensi, maka kita perlu memastikan bahwa dengan alasan yang dapat diterima, intervensi akan dilakukan oleh lembaga/pribadi yang lebih tinggi/berkuasa untuk melakukannya. *Dua*, toleransi dapat diberikan kepada sikap pemaksaan yang dilakukan pihak lain. Tetapi, pihak yang memberikan toleransi tidak dapat membiarkan dirinya melakukan pemaksaan itu sendiri. Kewajiban moral pihak yang punya kuasa melakukan intervensi terhadap tindakan yang tidak dapat ditolerir dibatasi hanya sampai pada melakukan koreksi terhadap sikap. Interventor sangat mungkin kecewa karena tindakan kurang pantas yang dilakukan pihak tertentu. Tetapi, ia hanya bisa bertindak sejauh memberikan pemahaman secara persuasif. *Tiga*, sikap atau tindakan yang tidak dapat ditolerir perlu memperoleh hukuman. Hukuman atau sanksi yang dibicarakan di sini tidak selalu identik dengan penjara, kurungan, atau denda. Pada dasarnya, intervensi yang diberikan oleh pihak yang punya kuasa mentolerir sudah dapat dinilai sebagai hukuman. Karena pada dasarnya, hukum selalu mengatur hal minimal yang dapat diterima oleh banyak orang.

Daftar Pustaka

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155.
- Benson, I. O. (2016). Theory and praxis of religious tolerance. *OGIRISI: A New Journal of African Studies*, 12, 293-318.
- Collier, C. W. (1998). A Legal Theory of Tolerance and Perspective. *ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 84(1), 59-86.
- Erspamer, P. R. (1997). Concluding Remarks: Beyond the Tolerance Debate. In *The Elusiveness of Tolerance: The "Jewish Question" From Lessing to the Napoleonic Wars* (Vol. 117, pp. 151-156). University of North Carolina Press.
- Ferretti, M. P., & Lægaard, S. (2013). A Multirelational Account of Toleration. *Journal of Applied Philosophy*, 30(3), 224-238.
- Firmanto, A. D. (2017a). Kehadiran Gereja Di Ruang Publik Perspektif Eklesiologis Di Dalam Memandang Keadaan Akhir-Akhir Ini. *Seri Filsafat Teologi*, 27(26), 272-285.
- Firmanto, A. D. (2021). WhatsApp Group Sebagai Ruang Percakapan Pastoral Di Masa Pandemi Covid-19. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 6(2), 480-495.

- Firmanto, A. D., & Setiyaningtiyas, N. (2017b). Local Wisdom as Integration of the Cosmic and the Metacosmic Perspectives in Indonesian Philosophy of Education. In *3rd International Conference on Education and Training (ICET 2017)*. Atlantis Press.
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179-192.
- Forst, R. (2018). Toleration, justice and reason. In C. McKinnon & D. Castiglione (Eds.), *The culture of toleration in diverse societies: Reasonable tolerance* (pp. 71–85). Manchester University Press.
- Forst, R. (2020). The dialectics of toleration and the power of reason(s): Reply to my critics. In *Toleration, power and the right to justification* (pp. 167-220). Manchester University Press.
- Gallagher, T., & Duffy, G. (2016). Recognising Difference While Promoting Cohesion: The Role of Collaborative Networks in Education. In I. Honohan & N. Rougier (Eds.), *Tolerance and diversity in Ireland, North and South* (pp. 35–54). Manchester University Press.
- Glaser, E. (eds). (2014). *Religious Tolerance in the Atlantic World: Early Modern and Contemporary Perspectives*. UK. Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49.
- Jarman, N. (2016). Prejudice and (in)tolerance in Ulster. In I. Honohan & N. Rougier (Eds.), *Tolerance and diversity in Ireland, north and south* (pp. 189–210). Manchester University Press.
- Jenks, C. W. (1967). Tolerance And Good Neighbourliness: As Concepts Of International Law. *Malaya Law Review*, 9(1), 1–9.
- Kant, I. (1927). *Perpetual Peace- A Philosophical Proposal*, trans, by Helen O’Brien. London: Sweet & Maxwell, Limited.
- Kant, I. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, edited by H. J. Paton (London: Routledge, 1991), Chapter 2, pp. 71–106.
- Kellner, M. (2021). Tolerance. In *We Are Not Alone: A Maimonidean Theology of the Other* (pp. 105–136). Academic Studies Press.
- Lacorne, D. (2019). *The Limits of Tolerance: Enlightenment Values and Religious Fanaticism*. New York. Columbia University Press.
- Lee, F. L. F. (2014). “Tolerated One Way but Not the Other”: Levels and Determinants of Social and Political Tolerance in Hong Kong. *Social Indicators Research*, 118(2), 711–727.
- Lester, E., & Roberts, P. S. (2006). The Distinctive Paradox of Religious Tolerance: Active Tolerance as a Mean between Passive Tolerance and Recognition. *Public Affairs Quarterly*, 20(4), 329–362.
- Lombardini, J. (2015). Stoicism And the Virtue of Toleration. *History of Political Thought*, 36(4), 643–669.
- Mensch, J. R. (2009). Sustaining the Other: Tolerance as a Positive Ideal. In *Embodiments: From the Body to the Body Politic* (pp. 141–147). Northwestern University Press.
- Meza, P. T. (1981). Gilbert Burnet’s Concept of Religious Toleration. *Historical Magazine of the Protestant Episcopal Church*, 50(3), 227–242.
- Mondak, J. J., & Sanders, M. S. (2005). The Complexity of Tolerance and Intolerance Judgments: A Response to Gibson. *Political Behavior*, 27(4), 325–337.
- Muhammad, A., & Hastiadi, F. F. (2022). Peran Agama Dan Moderasi Beragama dalam Membentuk Perilaku Ramah Pendatang: Bukti Empiris Pada 5 Negara Asean. *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren*, 1(2), 11-19.

- Mulligan, T. (2015). The Limits of Liberal Tolerance. *Public Affairs Quarterly*, 29(3), 277–295.
- Murtado, R. Z. (2021). Kearifan Lokal, Tradisi Pesantren, dan Masalah Toleransi Beragama di Indonesia. *Tsamratul Fikri/ Jurnal Studi Islam*, 15, 143-154.
- Nurdin, A. A. (2022). Kaji Ulang Hubungan Agama dan Politik. *Tashwirul Afkar*, 41(2), 261-274.
- Puri, B. (2021). *Re-Thinking Religious Pluralism: Moving Beyond Liberal Tolerance*. Singapore. Springer.
- Setyabudi, M.N.P. (2020). Toleransi: Dari Pengalaman Sejarah Menuju Konstruksi Teoritis. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 103-111.
- Setyawan, N. B., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 27-34.
- Spinner-Halev, J. (2005). Hinduism, Christianity, and Liberal Religious Toleration. *Political Theory*, 33(1), 28–57.
- Tan, K.-C. (2011). Two Conceptions of Liberal Global Toleration. *The Monist*, 94(4), 489–505.
- Thomassen, L. (2006). The Inclusion of the Other? Habermas and the Paradox of Tolerance. *Political Theory*, 34(4), 439–462.
- UNESCO. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*.
- Velassery, S. (2021). Religious Violence in a World of Conflicts: A Phenomenological Narrative. In *Re-Thinking Religious Pluralism: Moving Beyond Liberal Tolerance* (pp. 21-36). Singapore. Springer.
- Wahyudi, W. (2019). Nilai Toleransi Beragama Dalam Tradisi Genduren Masyarakat Jawa Transmigran. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(2), 133-139.
- Waldron, J. (2018). Toleration and reasonableness. In *The culture of toleration in diverse societies* (pp. 13-37). Manchester University Press.
- Webb, A. (2009). Interreligious Dialogue and Cosmopolitan Faith. *Soundings: An Interdisciplinary Journal*, 92(1/2), 159-187.
- Yan, M. (2012). Tolerance or Hospitality? *Frontiers of Philosophy in China*, 7(1), 154–163.
- Yunus, R., Mahmud, R., Ngiu, Z., & Hubeli, W. (2022). Sosialisasi tentang menumbuhkan kesadaran toleransi pada masyarakat majemuk di Universitas Negeri Manado. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(2), 33-35.